



RENCANA KERJA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI
UTARA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat-Nya semata, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dan Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya yang memuat informasi tentang rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif di Kabupaten Tapanuli Utara.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020-2024.

Tarutung, 31 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMPTSP TAHUN 2021	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023 dan Capaian Renstra	9
2.2 Analis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	17
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	28
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	38
BAB V PENUTUP	43
Lampiran	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses yang memegang peranan sangat penting bagi terlaksananya suatu kegiatan pembangunan yang baik. Perencanaan harus dijadikan suatu pedoman dan landasan bagi suatu kegiatan pembangunan, dan harus dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi dan evaluasi terhadap kinerja dimasa yang lalu. Disamping itu perencanaan yang baik juga harus disesuaikan dengan visi dan misi dari pembangunan itu sendiri.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024 yaitu “ Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas serta Daerah Wisata” maka seluruh perencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara harus berpedoman kepada Visi dan Misi tersebut, sehingga tercipta suatu arah pembangunan daerah yang baik dan bersinergis. Selain itu, pengaruh isu-isu global yang sedang terjadi juga sangat berpengaruh bagi perencanaan yang akan dibuat, sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi perkembangan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi situasi perkembangan global yang terjadi di suatu daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam waktu kurun satu tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu upaya memantapkan implementasi mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah secara partisipatif maka diperlukan komitmen dan konsistensi dari berbagai pihak (*stakeholder*) yang lebih solid di berbagai lini pengambilan keputusan.

Hal ini penting dan perlu mendapat perhatian luas sehubungan dengan upaya-upaya pemantapan pelaksanaan otonomi daerah dan akuntabilitas pemerintahan daerah.



Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Perencanaan pembangunan tersebut secara garis besar dilaksanakan melalui empat (4) tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Pada Bab II pasal 7 (2) UU No 25 Tahun 2004 telah dijelaskan bahwa Renja-PD disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kepala Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Kepala Perangkat Daerah juga bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan, sasaran, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyusun Renja Tahun 2024 yang merupakan dokumen rencana pembangunan PD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat mendukung keberhasilan RKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020 – 2024;
- 26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara;



- 28) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025;
- 29) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
- 30) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025;
- 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
- 34) Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan sebagai langkah operasional dari perencanaan jangka menengah atau Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah:

1. Menjabarkan arahan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024 kedalam Rencana Kerja yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara.



2. Untuk menentukan rencana prioritas program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan periode sebelumnya, mengenai masalah yang dihadapi, dan dalam pelaksanaannya mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya yang ada guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan. sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Rencana Program dan Kegiatan prioritas adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Renja PD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra PD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada SPBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



- 2.3 **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, yang berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. **Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**, yang merupakan peninjauan kembali terhadap rancangan rencana kerja awal dengan perbandingan dengan rencana kerja yang dilaksanakan.
- 2.5. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, yang menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para stake holder, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.
- 3.2. **Tujuan dan Sasaran Renja PD**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.
- 3.3 **Program dan Kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan



kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, yang menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Capaian Renstra DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan dapat dilihat sebagai berikut:

2.1.1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumberdaya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan Indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



2.1.2. Capaian Analisis Kinerja

Secara umum rata-rata capaian kinerja yang telah dicapai tahun anggaran 2023 adalah sebesar 96,36%, dan diharapkan pada tahun 2024 ini capaian kinerja tersebut akan mencapai 100% disetiap Program dan Kegiatan. Oleh karena itu secara umum dapat dikatakan capaian kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan pada Renstra PD yang telah direncanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya karena mengalami refocusing anggaran. Kegiatan yang bersumber dari dana DAK yang terfokus pada pembinaan pelaku usaha dan identifikasi masalah yang termasuk pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan capaian kinerja 100% dari target 350 pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan, dan untuk pengawasan penanaman modal pada sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal belum terlaksana maksimal dengan capaian kinerja 80%. Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, beberapa rencana kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya telah sesuai dengan kebutuhan, namun ada yang mengalami perubahan. Diantaranya ada kegiatan yang memiliki tingkat realisasi anggaran terendah yaitu Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan, hal ini dikarenakan konsultasi dan pengaduan masyarakat yang masuk sangat rendah, hanya 1 pengaduan masyarakat yang masuk dan telah ditindaklanjuti, dari target 10 pengaduan yang ditindaklanjuti.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18.	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2. 18. 01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100%	100 Persen	100 Persen	100%
1. 03. 01. 2. 01.	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
2. 18. 01. 2. 01. 01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
2. 18. 01. 2. 01. 06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%	1 Dokumen LAKIP	1 Dokumen LAKIP	100%
2. 18. 01. 2. 01. 07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	-	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta	-	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	100%
2. 18. 01. 2. 02. 01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	100%	28 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%
2. 18. 01. 2. 02. 03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	50 Dokumen	50 Dokumen	100%
2. 18. 01. 2. 02. 05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%	1 Dokumen Lap. Keuangan	1 Dokumen Lap. Keuangan	100%
2. 18. 01. 2. 02. 07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	14 Laporan	-	-	-	-	14 Laporan	14 Laporan	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18. 01. 2. 06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetakan dan Penggandaan, Fasilitas Kunjungan Tamu serta Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18. 01. 2. 06. 01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	5 Paket	5 Paket	100%
2. 18. 01. 2. 06. 02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18. 01. 2. 06. 03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18. 01. 2. 06. 05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan disediakan	12 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Paket	12 Paket	100%
2. 18. 01. 2. 06. 08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Laporan	Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 06. 09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18. 01. 2. 08. 01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 08. 02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 08. 04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
2. 18. 01. 2. 09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2. 18. 01. 2. 09. 01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	5 Unit	5 Unit	100%
2. 18. 01. 2. 09. 06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2. 18. 01. 2. 09. 09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2. 18. 01. 2. 09. 11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	6 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	10 Unit	10 Unit	100%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18. 02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	45 Investor	30 Investor	40 Investor	42 Investor	105%	40 Investor	42 Investor	105%
2. 18. 02. 2. 01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10 Investor	-	5 Kali	5 Kali	-	5 Kali	5 Kali	-
2. 18. 02. 2. 01. 01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	10 Investor	3 Kali	10 Kali	5 Kali	50%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. 18. 02. 2. 01. 2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 18. 02. 2. 02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	-
2. 18. 02. 2. 02. 01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	1 Dokumen Perda	1 Dokumen	1 Dokumen Perda	1 Dokumen Perda	100%	-	-	-
2. 18. 02. 2. 02. 02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. 18. 03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	6 Event	-	5 Event	3 Event	60%	6 Event	3 Event	60%
2. 18. 03. 2. 01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-
2. 18. 03. 2. 01. 01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2. 18. 03. 2. 01. 02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	6 Event	-	5 Event	3 Event	60%	6 Event	4 Event	67%
2. 18. 04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	91 Persen	91,50 Persen	90 Persen	93,40 Persen	104%	91 Persen	90.54 Persen	99%
2. 18. 04. 2. 01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	650 Dokumen dan 15 pengaduan	1300 Dokumen dan 12 pengaduan	650 Dokumen dan 15 pengaduan	650 Dokumen dan 15 pengaduan	-	650 Dokumen dan 15 pengaduan	1148 Dokumen dan 15 pengaduan	177%
2. 18. 04. 2. 01. 01.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku usaha	1.300 Dokumen	650 Dokumen	940 Dokumen	142%	650 Dokumen	1148 Dokumen	177%



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2. 18. 04. 2. 01. 02.	Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapat pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	20 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	100%
2. 18. 04. 2. 01. 03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah Orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10 Orang	12 Pengaduan	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%	10 Pengaduan	1 Pengaduan	10%
2. 18. 04. 2. 01. 04.	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah	10 Kegiatan Usaha	-	-	-	-	-	-	-
2. 18. 05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	96,7 Persen	70 Persen	70 Persen	100%	70 Persen	70 Persen	100%
2. 18. 05. 2. 01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya profil hasil pemantauan dan pengawasan, terlaksananya monitoring kepemilikan izin dan bimtek/sosialisasi kemudahan berusaha serta validasi faktual dan berita acara pengawasan terhadap pelaku usaha	350 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan dan 80 BAP	-	350 pelaku usaha, 35 Kegiatan Usaha	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	-	350 pelaku usaha, 35 Kegiatan Usaha	223 pelaku usaha, 59 Kegiatan Usaha	-
2. 18. 05. 2. 01. 01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pelaksanaan penanaman modal	40 Kegiatan Usaha	29 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan	-	-	-	40 Kegiatan Usaha	40 Kegiatan Usaha	100.0%
2. 18. 05. 2. 01. 01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	350 pelaku usaha	256 pelaku usaha	350 pelaku usaha	223 pelaku usaha	63.7%	350 pelaku usaha	350 pelaku usaha	100.0%
2. 18. 05. 2. 01. 01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang koordinasi dan sinkronisasi, pengawasan, pelaksanaan penanaman modal	40 kegiatan usaha	29 pelaku usaha, 70 pemilik bangunan	35 Kegiatan Usaha	59 Kegiatan Usaha	168.6%	40 kegiatan usaha	58 Kegiatan Usaha	145.0%
2. 18. 06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi yang Dikendalikan	80 Persen	75 Persen	78 Persen	78 Persen	100%	78 Persen	78 Persen	100%
2. 18. 06. 2. 01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeliharaan ISO, survey IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%
2. 18. 06. 2. 01. 01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan unit pelayanan terpadu satu pintu kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi yang memberikan pelayanan terpadu maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bekerja sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya pedoman pada SOP tersebut, maka pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dijalankan dengan baik.

Pada tahun 2016 sampai tahun 2023, Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara telah meraih Sertifikat ISO 9001:2015 sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam hal peningkatan pelayanan publik, dan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan standar mutu ISO tersebut, maka perbaikan sistem pelayanan harus dilakukan setiap waktu sehingga diperoleh tingkat pelayanan yang prima. Sehingga dalam penilaian kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang rutin dilaksanakan oleh Ombudsman, pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dikategorikan Baik dan berada pada Zona Hijau. Hal ini dapat terlihat dari cakupan pelayanan perizinan yang ditindaklanjuti tercapai 100%. Untuk itu diharapkan di tahun 2024 untuk menaikkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu diharapkan persentase izin yang terbit tepat waktu dapat mencapai 92%, terdapat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tapanuli Utara

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (Thn n)	Tahun 2025 (Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021		100%	100%	100%	100%	220.9%	586.8%	100%	100%	
2	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021		90%	91%	92%	92%	93.40%	90.56%	92%	92%	
4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021	Persentase Peningkatan investasi di kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Cakupan Pelayanan Perizinan yang ditindaklanjuti	Perbup Nomor 61 Tahun 2020, dan Standar Pelayanan Nomor 20 Tahun 2021	Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	101.60%	87,81%	100%	100%	
7	Persentase Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	Permendagri Nomor 77 Tahun 2020	Temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Nilai hasil evaluasi AKIP	Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	Nilai AKIP yang diberikan Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	

note : semua target (semua kolom) diisi dgn persentase (%) karena bersifat Outcome



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara memiliki tugas dan fungsi antar lain:

1. Penyelenggaraan penyusunan program Dinas;
2. Penyelenggaraan promosi, perencanaan, kerjasama dan pengembangan penanaman modal;
3. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
4. Penyelenggaraan koordinasi proses pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
6. Penyelenggaraan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tapanuli Utara difokuskan pada peningkatan nilai investasi, pelayanan perizinan dan non perizinan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan, promosi, dan penanganan pengaduan.

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini adalah **Rendahnya Nilai Investasi**, yang disebabkan oleh:

1. Belum optimalnya informasi dan strategi promosi pengembangan potensi daerah yang berbasis IT di bidang penanaman modal;
2. Kurangnya regulasi dibidang penanaman modal,
 - a. Belum adanya regulasi yang mengatur pemberian fasilitasi/insentif kepada para pelaku usaha.
 - b. Belum adanya regulasi tentang Strategi Promosi
3. Kurangnya kualitas pelayanan, hal ini dikarenakan oleh:
 - a. Minimnya sarana dan prasarana;



- b. Minimnya kualitas Sumber Daya Manusia;
- c. Kurangnya koordinasi antar instansi teknis.

2.3.2 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi Kabupaten Tapanuli Utara yang telah ditetapkan yaitu **“Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta Daerah Tujuan Wisata”**.

Dalam rangka pencapaian visi ditetapkan pula Misi Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu:

1. Meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani melalui perlindungan petani dan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal.
3. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
5. Meningkatkan destinasi wisata melalui pengembangan kawasan wisata alam dan budaya, rohani dan agrowisata.
6. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang/wilayah perlindungan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.
7. Meningkatkan kapasitas desa menuju desa mandiri.
8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan sistem e-government.

Dari penjabaran Misi diatas, sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pemangku Misi ke-2.

Sebagai pemangku dari misi ke-2 yaitu Pengembangan komoditi dan produk unggulan daerah berbasis pertanian dan sumber daya lokal, yang bertujuan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, DPMPTSP



diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Tapanuli Utara melalui pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi**. Dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pengelolaan seluruh kegiatan Penanaman Modal dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman kepada kondisi alam dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara tanpa mengurangi fasilitatif kepada investor dalam rangka pemberian kemudahan – kemudahan dalam investasi dan pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu. Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel. Sebagai Perangkat Daerah yang bertugas menangani penerbitan perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha didalam pengurusan izin. Berbagai kemudahan telah diberikan, yang diharapkan dapat menstimulasi animo masyarakat didalam mengurus izin yang dibutuhkannya.

2.3.3 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan antara lain: keterbatasan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan baik untuk peningkatan Kapasitas SDM, monitoring, maupun peninjauan lapangan.



Dengan keterbatasan yang dirasakan diatas, maka pelayanan yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan di tahun-tahun yang akan datang. Disamping itu, perlu juga dilihat peluang dan potensi yang harus dikembangkan dan diraih untuk meningkatkan pelayanan terpadu yang nantinya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat perkembangan dunia usaha yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, terlihat jelas bahwa potensi untuk mengembangkan perizinan masih sangat mungkin untuk dilaksanakan. Hal inilah yang perlu dipandang sebagai peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.3.4 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Sebagai garda depan investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan nilai investasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menyelenggarakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan nilai investasi, serta pertumbuhan dan pengembangan potensi unggulan daerah, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara adalah:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. Penyusunan Strategi dan Peningkatan Promosi penanaman modal yang lebih inovatif.
3. Peningkatan Kualitas pelayanan perizinan.
4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai.
5. Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat
6. Pemuktahiran data potensi investasi dan peluang usaha Kabupaten Tapanuli Utara



7. Peningkatan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
8. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Apabila kita membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terdapat kesamaan. Adapun kesamaan tersebut terjadi karena adanya identifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk dapat segera dilaksanakan. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan untuk dapat melihat apakah rancangan awal OPD yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan riil.

Akan tetapi, disamping itu juga terdapat adanya perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya kebutuhan akan suatu kegiatan yang tidak diakomodir pada rancangan awal RKPD. Perbedaan yang terjadi ini tidaklah mengurangi esensi atau pun bertentangan dengan Rancangan awal RKPD, hanya saja untuk menyikapi kekurangan-kekurangan didalam penyusunan sebelumnya serta sebagai jawaban atas antisipasi isu-isu strategis yang berkembang secara dinamis, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	3,283,291,554.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DPMPTSP	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi	100 Persen	2,685,258,409.00	
	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya	1 Dokumen LAKIP	65,000,000.00	Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Terlaksananya Penyusunan dokumen LAKIP Tahun Sebelumnya	1 Dokumen LAKIP	25,000,000.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	25,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2 Dokumen	4,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3,000,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	35,000,000.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	12 Laporan	18,000,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	12 bulan	2,442,132,354.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD serta Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	2,247,936,718.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2,379,082,354.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2,191,849,518.00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	53,050,000.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	50 Dokumen	50,587,200.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen Laporan Keuangan	3,000,000.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14 Laporan	5,000,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	14 Laporan	2,500,000.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	333,000,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	187,013,425.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	10,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	5,003,100.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	65,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	29,994,525.00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	25,000,000.00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga disediakan	12 Paket	7,000,800.00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	12 Paket	30,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan disediakan	12 Paket	15,000,000.00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	3,000,000.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200,000,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130,015,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	135,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	-	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	3 Unit	55,000,000.00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	80,000,000.00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	166,159,200.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	154,430,716.00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	55,000,000.00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	44,019,600.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	109,159,200.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	109,411,116.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	12 Bulan	142,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor	12 Bulan	70,877,550.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	85,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5 Unit	63,857,150.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	7,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	7,020,400.00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	30,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara	6 Unit	20,000,000.00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara	6 Unit	-	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Peningkatan Jumlah Investor	45 Investor	199,329,399.82	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Peningkatan Jumlah Investor	45 Investor	95,000,000.00	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha	12 Bulan	60,000,000.00	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Tersedianya pendampingan dan fasilitasi serta forum dialog pemerintah dengan badan usaha	12 Bulan	90,000,000.00	
	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dok	60,000,000.00	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dok	90,000,000.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	5 Kegiatan Usaha	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	5 Kegiatan Usaha	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha	2 Dokumen	139,329,399.82	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya persiapan penyusunan RUPM dan tersedianya peta potensi dan peluang usaha	2 Dokumen	5,000,000.00	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	1 Dokumen	-	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	1 Dokumen	139,329,399.82	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	1 Dokumen	5,000,000.00	
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	6 Event	138,070,400.00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	6 Event	20,000,000.00	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	2 Dok	138,070,400.00	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	2 Dok	20,000,000.00	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	1 Dok	-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	1 Dok	-	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dok	138,070,400.00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Dok	20,000,000.00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	91 Persen	133,959,700.00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu	91 Persen	84,974,300.00	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	12 Bulan	133,959,700.00	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP	Tercapainya peningkatan kapasitas pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu serta tersedianya layanan konsultasi dan pengaduan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah	12 Bulan	84,974,300.00	
	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku usaha	100,000,000.00	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	650 Pelaku usaha	75,000,000.00	
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Orang	13,959,700.00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Orang	4,974,300.00	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/ Kota bagi Kegiatan	20 Kegiatan Usaha	5,000,000.00	
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	398,085,151.12	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Izin yang Dikendalikan	75 Persen	569,981,000.00	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	350 pelaku usaha, 29 Kegiatan Usaha	398,085,151.12	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	1 Sertifikat	569,981,000.00	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	50,000,000.00	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40 Kegiatan Usaha	85,497,000.00	DAK Non Fisik



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 pelaku usaha	298,085,151.12	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	350 pelaku usaha	313,491,000.00	DAK Non Fisik
	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	40 kegiatan usaha	50,000,000.00	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	40 kegiatan usaha	170,993,000.00	DAK Non Fisik
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan	80 Persen	82,740,180.14	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan	80 Persen	70,000,000.00	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Dok	82,740,180.14	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	2 Dok	70,000,000.00	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 Dok	82,740,180.14	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	2 Dok	70,000,000.00	
	TOTAL PAGU				4,235,476,385.08	TOTAL PAGU				3,525,213,709.00	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang datang dari masyarakat baik itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun stakeholder yang lain hingga saat ini belum terakomodir. Hal ini disebabkan ketersediaan dana saat ini sangat minim.

Adapun usulan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal diharapkan dapat meningkatkan capaian Nilai Realisasi Investasi. Hal ini dapat dilakukan karena pelaksanaan pelayanan publik telah dilakukan secara terus menerus, dan kebutuhan yang dirasakan masih dalam ruang lingkup yang sama.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan 2024
Kabupaten Tapanuli Utara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	85,497,000.00	DAK Non Fisik
2	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	313,491,000.00	DAK Non Fisik
3	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP Kab. Tapanuli Utara	<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan</i>	170,993,000.00	DAK Non Fisik



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program sasaran dan kegiatan organisasi dapat dicapai.

Berdasarkan pengertian diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengembangan investasi
2. Meningkatkan kualitas Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal kepada para pelaku usaha/investor agar taat dalam pelaporan LKPM
4. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas SDM pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Penerapan Standar Pelayanan yang mudah, murah, pasti, transparan, dan terjangkau;

Kebijakan tersebut diatas akan diimplementasikan dalam bentuk surat – surat keputusan dan akan dijadikan pedoman:

1. Mengatur mekanisme kegiatan lanjutan.
2. Mengarahkan setiap pejabat dan pelaksana bahwa mereka memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan tujuan yaitu, **Meningkatnya Nilai Investasi**. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara struktur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:



1. Meningkatkan Nilai Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023, Nilai realisasi investasi tahun 2023 adalah 1,760 Triliun Rupiah, realisasi nilai investasi tahun 2023 telah melampaui target Nilai Investasi tahun 2024, sehingga pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 kami menetapkan perubahan pada target kinerja sebagai berikut;

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun
				2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)
1	Meningkatnya Nilai Investasi	Meningkatkan Nilai Investasi	Nilai Investasi	430.000.000.000
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	92
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87,00
2	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP yang dikeluarkan Inspektorat	80

3.3. Program dan Kegiatan

1. Program Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dilaksanakan oleh seluruh Aparatur Pemerintah pada OPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP guna mencapai tujuan dan sasaran. Hal-hal yang menjadi landasan penetapan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara:

- Memperhatikan kepentingan masing-masing Sekretariat dan Kepala-kepala Bidang
- Memperhatikan program kerja Kabupaten Tapanuli Utara
- Mempertimbangkan keadaan masa lampau, kini dan masa datang.
- Memperhatikan skala prioritas yang menunjang Visi dan Misi.



Program kerja yang dimaksud adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
3. Program Promosi Penanaman Modal.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

2. Kegiatan

Rumusan Rencana Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 terlampir dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sesuai dengan program kerja adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- a. Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/kota.
3. Program Promosi Penanaman Modal
- a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota.
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal.



- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
- a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik
 - Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko.
 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah
5. Program Pengendalian Pelaksanaan dan Penanaman Modal.
- a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.
 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.
 - Pengawasan Penanaman Modal.
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- a. Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.	18.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100 Persen	2,685,258,409.00			100 Persen	3,283,291,554.00
1.	03.	01.	2.	01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen LAKIP	25,000,000.00			1 Dokumen LAKIP	65,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPTSP	12 Dokumen	4,000,000.00	DAU	-	12 Dokumen	25,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	2 Laporan	3,000,000.00	DAU	-	2 Laporan	5,000,000.00
2.	18.	01.	2.	01.	07. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	12 Laporan	18,000,000.00	DAU	-	12 Laporan	35,000,000.00
2.	18.	01.	2.	02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	4 Kegiatan	2,247,936,718.00			Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD 12 Bulan serta Lap. Keuangan	2,442,132,354.00
2.	18.	01.	2.	02.	01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 Orang/ Bulan	2,191,849,518.00	DAU	-	25 Orang/ Bulan	2,379,082,354.00
2.	18.	01.	2.	02.	03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	50 Dokumen	50,587,200.00	DAU	-	50 Dokumen	53,050,000.00
2.	18.	01.	2.	02.	05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	3,000,000.00	DAU	-	1 dokumen Laporan Keuangan	5,000,000.00
2.	18.	01.	2.	02.	07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	DPMPTSP	14 Dokumen	2,500,000.00	DAU	-	14 Dokumen	5,000,000.00
2.	18.	01.	2.	03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	-	-			-	-
2.	18.	01.	2.	03.	05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	01.	2.	05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	-	-			-	-
2.	18.	01.	2.	05.	03.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2.	05.	09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2.	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	5 Kegiatan	187,013,425.00			12 bulan	333,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	5 Paket	5,003,100.00	DAU	-	12 Paket	10,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	12 Paket	29,994,525.00	DAU	-	12 Paket	65,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	12 Paket	7,000,800.00	DAU	-	12 Paket	25,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPMPTSP	12 Paket	15,000,000.00	DAU	-	12 Paket	30,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPMPTSP	Laporan	-	DAU	-	Laporan	3,000,000.00
2.	18.	01.	2.	06.	09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	130,015,000.00	DAU	-	12 Laporan	200,000,000.00
2.	18.	01.	2.	07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMPTSP	12 Bulan	-			12 Bulan	135,000,000.00
2.	18.	01.	2.	07.	05.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	1 Unit	-	DAU	-	1 Unit	55,000,000.00
2.	18.	01.	2.	07.	05.	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	01.	2.	07.	06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	5 Unit	-	DAU	-	5 Unit	80,000,000.00
2.	18.	01.	2.	07.	10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	01.	2.	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terlaksananya Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	DPMPTSP	3 Kegiatan	154,430,716.00			12 Bulan	166,159,200.00
2.	18.	01.	2.	08.	01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	1,000,000.00	DAU	-	1 Laporan	2,000,000.00
2.	18.	01.	2.	08.	02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMPTSP	36 Laporan	44,019,600.00	DAU	-	36 Laporan	55,000,000.00
2.	18.	01.	2.	08.	03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMPTSP	12 Laporan	109,411,116.00	DAU	-	12 Laporan	109,159,200.00
2.	18.	01.	2.	09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor</i>	DPMPTSP	20 Unit	70,877,550.00			12 Bulan	142,000,000.00
2.	18.	01.	2.	09.	01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMPTSP	5 Unit	63,857,150.00	DAU	-	5 Unit	85,000,000.00
2.	18.	01.	2.	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	8 Unit	7,020,400.00	DAU	-	8 Unit	7,000,000.00
2.	18.	01.	2.	09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	1 Unit	-	DAU	-	1 Unit	30,000,000.00
2.	18.	01.	2.	09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	6 Unit	-	DAU	-	6 Unit	20,000,000.00
2.	18.	02.			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	DPMPTSP	40 Investor	95,000,000.00			40 Investor	100,000,000.00
2.	18.	02.	2.	01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	<i>Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>	DPMPTSP	10 Investor	90,000,000.00			10 Investor	60,000,000.00
2.	18.	02.	2.	01.	01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Dok	90,000,000.00	DAU	-	1 Dok	60,000,000.00
2.	18.	02.	2.	01.	02.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	-	-	DAU	-	-	-
2.	18.	02.	2.	02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang tersedia</i>	DPMPTSP	3 Dokumen	5,000,000.00			3 Dokumen	40,000,000.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025		
Urusan	Bidang Urusan	program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	
2.	18.	02.	2.	02.	01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	DPMPTSP	1 Dokumen Perda RUPM	-	DAU	-	1 Dokumen Perda RUPM	20,000,000.00
2.	18.	02.	2.	02.	02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	DPMPTSP	2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	5,000,000.00	DAU	-	2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	20,000,000.00
2.	18.	03.				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Keikutsertaan pada Pameran Investasi	DPMPTSP	5 Event	20,000,000.00			5 Event	237,400,000.00
2.	18.	03.	2.	01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	DPMPTSP	1 Dokumen	20,000,000.00			1 Dokumen	237,400,000.00
2.	18.	03.	2.	01.	01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	DPMPTSP	1 Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	-	DAU	-	1 Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	87,400,000.00
2.	18.	03.	2.	01.	02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	1 Dokumen	20,000,000.00	DAU	-	1 Dokumen	150,000,000.00
2.	18.	04.				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	90 Persen	84,974,300.00			90 Persen	153,959,500.00
2.	18.	04.	2.	01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	650 Dokumen dan 10 pengaduan	84,974,300.00			650 Dokumen dan 10 pengaduan	153,959,500.00
2.	18.	04.	2.	01.	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	650 Dokumen	75,000,000.00	DAU	-	650 Dokumen	100,000,000.00
2.	18.	04.	2.	01.	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	4,974,300.00	DAU	-	20 Kegiatan Usaha	20,000,000.00
2.	18.	04.	2.	01.	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	10 Pengaduan	5,000,000.00	DAU	-	10 Pengaduan	13,959,500.00



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif
2.	18.	04.	2.	01.	09	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	10 Kegiatan Usaha	-	DAU	-	10 Kegiatan Usaha	20,000,000.00
2.	18.	05.				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	75 Persen	569,981,000.00			75 Persen	398,085,151.12
2.	18.	05.	2.	01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	350 pelaku usaha dan 40 Kegiatan Usaha	569,981,000.00			256 pelaku usaha dan 14 Kegiatan Usaha	398,085,151.12
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	85,497,000.00	DAK	-	40 Kegiatan Usaha	50,000,000.00
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	DPMPTSP	350 pelaku usaha	313,491,000.00	DAK	-	350 pelaku usaha	298,085,151.12
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Pengawasan Penanaman Modal	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	170,993,000.00	DAK	-	40 kegiatan usaha	50,000,000.00
2.	18.	06.				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP	80 Persen	70,000,000.00			80 Persen	82,740,180.14
2.	18.	06.	2.	01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	70,000,000.00			1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	82,740,180.14
2.	18.	06.	2.	01.	01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	1 Sertifikat	70,000,000.00	DAU	-	1 Sertifikat	82,740,180.14
						TOTAL PAGU			3,525,213,709.00		-		4,255,476,385.26



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan dan sasaran, serta Perubahan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024. Penetapan Nomenklatur Perencanaan Program dan Kegiatan telah mengadopsi Keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara detail rumusan rencana kerja, program, kegiatan, serta pendanaan atau anggaran indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:



Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara

Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju 2025		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2	18.				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.	18.	01.			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSP	100 Persen	2,685,258,409.00	3,283,291,554.00			
1.	03.	01.	2.	01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	1 Dokumen LAKIP	25,000,000.00	65,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	01.	01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	DPMPTSP	12 Dokumen	4,000,000.00	25,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	01.	06. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	2 Laporan	3,000,000.00	5,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	01.	07. Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DPMPTSP	12 Laporan	18,000,000.00	35,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	02.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Gaji dan Tunjangan ASN dan Penatausahaan Keuangan SKPD, serta Lab. Keuangan	2,247,936,718.00	2,442,132,354.00			
2.	18.	01.	2.	02.	01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	25 Orang/ Bulan	2,191,849,518.00	2,379,082,354.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	02.	03. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	50 Dokumen	50,587,200.00	53,050,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	02.	05. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	1 dokumen Laporan Keuangan	3,000,000.00	5,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	02.	07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	DPMPTSP	14 Dokumen	2,500,000.00	5,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	03.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DPMPTSP	-	-	-			
2.	18.	01.	2.	03.	05. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	05.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DPMPTSP	-	-	-			
2.	18.	01.	2.	05.	03. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	05.	09. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	



Kode					Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju 2025		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.	01.	2.	06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Terlaksananya Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DPMPTSP	12 bulan	187,013,425.00	333,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	12 Paket	5,003,100.00	10,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	29,994,525.00	65,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	7,000,800.00	25,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	DPMPTSP	12 Paket	15,000,000.00	30,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu yang terlaksana	DPMPTSP	Laporan	-	3,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMPTSP	12 Laporan	130,015,000.00	200,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah yang menunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	DPMPTSP	12 Bulan	-	135,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	07.05.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	DPMPTSP	1 Unit	-	55,000,000.00	DAU	-	Sekretaris
2.	18.	01.	2.	07.05.	Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Mebel yang disediakan	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP	5 Unit	-	80,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terlaksananya Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</i>	DPMPTSP	12 Bulan	154,430,716.00	166,159,200.00			
2.	18.	01.	2.	08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DPMPTSP	1 Laporan	1,000,000.00	2,000,000.00	DAU		Sekretaris
2.	18.	01.	2.	08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	DPMPTSP	36 Laporan	44,019,600.00	55,000,000.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	08.03.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	DPMPTSP	12 Laporan	109,411,116.00	109,159,200.00	DAU	-	
2.	18.	01.	2.	09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Peralatan, Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Kantor</i>	DPMPTSP	12 Bulan	70,877,550.00	142,000,000.00			
2.	18.	01.	2.	09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DPMPTSP	5 Unit	63,857,150.00	85,000,000.00	DAU	-	



Kode						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Lokasi	Rencana Tahun 2024		Prakiraan Maju 2025		Catatan Penting	Penanggung Jawab	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana				
2.	18.	01.	2.	09.	06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	8 Unit	7,020,400.00	7,000,000.00	DAU		Sekretaris	
2.	18.	01.	2.	09.	09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP	1 Unit	-	30,000,000.00	DAU	-		
2.	18.	01.	2.	09.	11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diperlihara	DPMPTSP	6 Unit	-	20,000,000.00	DAU	-		
2.	18.	02.				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Peningkatan Jumlah Investor	DPMPTSP	40 Investor	95,000,000.00	100,000,000.00				
2.	18.	02.	2.	01.		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah dalam pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	10 Investor	90,000,000.00	60,000,000.00				
2.	18.	02.	2.	01.	01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Perda dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan penanaman modal	DPMPTSP	1 Dok	90,000,000.00	60,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi	
2.	18.	02.	2.	01.	02.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha dari yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	DPMPTSP	-	-	-	DAU	-		
2.	18.	02.	2.	02.		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota yang tersedia	DPMPTSP	3 Dokumen	5,000,000.00	40,000,000.00				
2.	18.	02.	2.	02.	01.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perda rencana umum penanaman modal daerah Tapanuli Utara	DPMPTSP	1 Dokumen Perda RUPM	-	20,000,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi	
2.	18.	02.	2.	02.	02.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah peta potensi dan peluang usaha kabupaten tapanuli utara	DPMPTSP	2 Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha	5,000,000.00	20,000,000.00	DAU	-		
2.	18.	03.				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Keikutsertaan pada Pameran Investasi	DPMPTSP	5 Event	20,000,000.00	237,400,000.00			
2.	18.	03.	2.	01.		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Tersusunnya Dokumen Strategi Promosi serta keikutsertaan pada kegiatan promosi penanaman modal	DPMPTSP	1 Dokumen	20,000,000.00	237,400,000.00			
2.	18.	03.	2.	01.	01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategis promosi penanaman modal	DPMPTSP	1 Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal	-	87,400,000.00	DAU	-	Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi	
2.	18.	03.	2.	01.	02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	1 Dokumen	20,000,000.00	150,000,000.00	DAU	-		
2.	18.	04.				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase izin yang Diterbitkan tepat waktu	DPMPTSP	90 Persen	84,974,300.00	133,959,500.00				
2.	18.	04.	2.	01.		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Terlaksananya Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibiidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	650 Dokumen dan 10 pengaduan	84,974,300.00	133,959,500.00				
2.	18.	04.	2.	01.	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	650 Dokumen	75,000,000.00	100,000,000.00	DAU			



Kode						Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (sesuai KEPMEN 050-3708 Tahun 2020)	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju 2025		Catatan Penting	Penanggung Jawab
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Kebutuhan dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		
2.	18.	04.	2.	01.	07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP	20 Kegiatan Usaha	4,974,300.00	20,000,000.00	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
2.	18.	04.	2.	01.	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	DPMPTSP	10 Pengaduan	5,000,000.00	13,959,500.00	DAU		
2.	18.	04.	2.	01.	09	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah		jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	DPMPTSP	10 Kegiatan Usaha	-	-	DAU		
2.	18.	05.				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Izin yang Dikendalikan	DPMPTSP	75 Persen	569,981,000.00	398,085,151.12			
2.	18.	05.	2.	01.		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha dari pelaku usaha yang mendapat pengendalian pelaksanaan penanaman modal	DPMPTSP	256 pelaku usaha dan 14 Kegiatan Usaha	569,981,000.00	398,085,151.12			
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Meningkatkan Nilai Investasi	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP	40 Kegiatan Usaha	85,497,000.00	50,000,000.00	DAK Non Fisik		Kepala Bidang Pengendalian Pelayanan, Informasi dan Pelaporan
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	DPMPTSP	350 pelaku usaha	313,491,000.00	298,085,151.12	DAK Non Fisik		
2.	18.	05.	2.	01.	01.	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	DPMPTSP	40 kegiatan usaha	170,993,000.00	50,000,000.00	DAK Non Fisik		
2.	18.	06.				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Informasi yang Dimutakhirkan	DPMPTSP	80 Persen	70,000,000.00	82,740,180.14			
2.	18.	06.	2.	01.		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya pemeliharaan ISO, dan tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan	DPMPTSP	1 Sertifikat ISO, IKM dan LKPM	70,000,000.00	82,740,180.14			
2.	18.	06.	2.	01.	01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	DPMPTSP	1 Sertifikat	70,000,000.00	82,740,180.14	DAU		Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
TOTAL PAGU											3,525,213,709.00	4,235,476,385.26			



BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 disusun untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,



[Signature]
IONNER JULIFER, ST
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700718 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (P-RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang – undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;

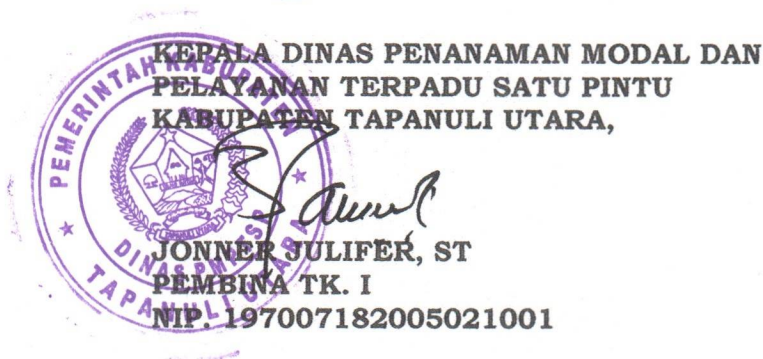
KEDUA : Renja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTSP Tahun 2023
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- e. Bab V : Penutup

- KETIGA : Renja Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu menjadi Pedoman dalam:
- a. Pelaksanaan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan bagi seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 2024;
 - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 31 Oktober 2023



Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. D. I. Panjaitan Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108, website: eperizinan@taputkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR: 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 – 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, Jo. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, Jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2006 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016 Nomor 09);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017 – 2037;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2021 Nomor 03)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan persiapan dalam mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan, melakukan pengendalian dan penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah meliputi Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024;
- b. Menyusun Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024;
- c. Menyusun Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024;
- d. Menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 - 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;

- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan bertanggung jawab terhadap penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 01 Juli 2023



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST
PEMBINA TK. I**

NIP. 19700718 200502 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kab. Tapanuli Utara;
2. Pertiinggal.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : **24** TAHUN 2023
TANGGAL : **01** Juli 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024**

- I. Ketua Tim : Jonner Julifer, ST/Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- II. Sekretaris Tim : Ir. Lince Rita Talebong/Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- III. Pelaksana Administrasi : 1. Susi Radotma Hutauruk, SE. MM/Kasubbag Umum dan Kepegawaian
2. Rungguk Pardede, SH/Analisis Keuangan
3. Siska Mariana Simanjuntak, SE/Analisis Rencana Program dan Kegiatan
- IV. Kelompok Kerja
 - A. Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi
Koordinator : Ronny M.B. Hutasoit, SE/Kepala Bidang Perencanaan, Promosi dan Pengembangan Investasi

Anggota : 1. Halomoan Batubara, ST., M.Si/Perencana
2. Christian Hutagalung, SP/Perencana
3. Marlon Peron V. Sianipar, SE/Perancang Peraturan Perundang-undangan
4. Marolop Sirait, ST/Analisis Pengembangan Potensi Daerah
5. Desi Susanti Lumban Gaol, SE/Analisis Penanaman Modal
 - B. Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan
Koordinator : Erwin Hasudungan Hutauruk, SP. M.Si/Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan, Informasi dan Pelaporan

Anggota : 1. Toni Rianto Sitorus, ST/Asesor Manajemen Mutu Industri
2. Evita Bernadeta Ginting, ST/Arsiparis
3. Albert Silitonga, SH/Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
4. Kristina Sitompul, A.Md/Pengelola Data Pengembangan Investasi

C. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Koordinator : Hotmauli Parhusip, SE., MM/Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Anggota : 1. Juherman Amubi Purba, SE/Analisis Kebijakan
2. Tulus Pinta Raja Situmeang, ST/Analisis Kebijakan
3. Marulam Silaban, ST/Analisis Dokumen Perizinan
4. Ruth Sabrina Matondang, SH/Analisis Dokumen Perizinan
5. Susenti Lasmaria Sitorus, A.Md/Pengelola Dokumen Perizinan



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA,**

**JONNER JULIFER, ST
PEMIRTA TK. I
NIP. 197007182005021001**